

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM



LAPORAN KINERJA

**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEMATANGSIANTAR**



**PELAKSANAAN KEGIATAN
DIPA T.A. 2019**

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintahan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pematangsiantar Tahun 2019 ini selesai disusun. LKj ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Pematangsiantar selama Tahun 2019. Penyusunan LKj ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, tugas pokok, fungsi dan organisasi; Perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja; Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKj Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 diucapkan banyak terima kasih. Semoga LKj ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pematangsiantar, 14 Januari 2020
Kepala Balai



Manahan Simangunsong, S.Hut,T., M.Sc
NIP. 19750520 199403 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai amanah Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BDLHK Pematangsiantar berkomitmen terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Hal itu dikarenakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik.

BDLHK Pematangsiantar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan diklat yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepemimpinan, teknis dan administrasi yang memiliki komitmen dan moralitas yang tinggi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan diklat bagi SDM LHK baik aparatur dan non aparatur (masyarakat).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BDLHK Pematangsiantar selama Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK: 300 orang
2. Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan: 1 Unit

3. Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan: 30 Orang
4. Terpenuhiya layanan sarana dan prasarana internal: 1 Layanan
5. Terealisasiya layanan perkantoran: 1 Layanan
6. Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup: 120 Orang

Selama Tahun anggaran 2019, Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami penambahan anggaran, dimana pagu awal sebesar Rp. 10.451.745.000,- menjadi Rp. 10.956.745.000,-. Hal ini terjadi karena ada kekurangan pada pembayaran gaji dan tunjangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2019 mencapai Rp. 10.921.782.141,- (99,68 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Organisasi	5
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2015-2019.	15
B. Rencana Kerja (Renja) Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019	17
C. Rencana Kinerja Balai Diklat Pematangsiantar Tahun 2019	22
D. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2019	22
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
1. Reviu atas Dokumen Perencanaan	23
2. Metode Pengukuran	23
3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	25
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	46
1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja.....	46
2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut	48
BAB. IV. PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 4 Keadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	8
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Kantor dan Asrama BDLHK Pematangsiantar	9
Tabel 6 Sarana dan Prasarana KHDTK HD Pondok Buluh	13
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Program BP2SDM tahun 2015-2019	16
Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM yang berkaitan dengan IKK BDLHK Pematangsiantar	17
Tabel 9 Rencana Kerja Tahunan BDLHK Pematangsiantar Tahun 2015-2019	18
Tabel 10 IKK dan Pagu Indikatif BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019	22
Tabel 11 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019	24
Tabel 12 Hasil Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019	25
Tabel 13 Hasil Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019	26
Tabel 14 Realisasi Diklat yang bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar	27
Tabel 15 Peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 16 Realisasi Diklat Kerjasama	29
Tabel 17 Daftar Pegawai Mutasi Tahun 2019	35
Tabel 18 Daftar Pegawai yang Mendapat Kenaikan Pangkat Tahun 2019	35
Tabel 19 Daftar Pegawai Pensiun Tahun 2019	35
Tabel 20 Realisasi Pelatihan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Jumlah Generasi Muda Lingkungan Hidup Tahun 2019	37
Tabel 21 Realisasi Anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019	38

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar	6
Gambar 2 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 3 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 4 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Gambar 5 Grafik Keadaan PPNPN berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Gambar 6 Peta KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh	12
Gambar 7 Sarana Prasarana di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh	14
Gambar 8 Grafik Perbandingan Jumlah Diklat Bagi Aparatur dan Non Aparatur ...	28
Gambar 9 Grafik Peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Gambar 10 Diklat Pengenalan Jenis Kayu	30
Gambar 11 Diklat Alih Tingkat Polhut Terampil ke Polhut Ahli	31
Gambar 12 Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan IV, V, dan VI.....	31
Gambar 13 Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Tingkat Ahli Jenjang Madya	32
Gambar 14 Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan 3 Angkatan 3 & 4	32
Gambar 15 <i>Capacity Building</i> BDLHK Pematangsiantar di KHDTK HD Pondok Buluh	33
Gambar 16 Praktek Kerja Lapang SMKN Pekanbaru di KHDTK HD Pondok Buluh....	33
Gambar 17 Akreditasi BDLHK Pematangsiantar oleh Tim Akreditasi Pusdiklat SDM .	34
Gambar 18 Dialog Multipihak dan Membangun Kesepahaman Bersama dan Pengelolaan KHDTK HD Pondok Buluh di BDLHK Pematangsiantar	34
Gambar 19 Uji Publik Penyusunan RP KHDTK Pondok Buluh di BDLHK Pematangsiantar.....	35
Gambar 20 Uji Publik Penyusunan RP KHDTK Pondok Buluh di KHDTK Pondok Buluh	36
Gambar 21 Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Areal Kerja Perhutanan Sosial	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan Kinerja/ SKP Kepala Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019
- Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran s.d Desember 2019
- Lampiran 3. Data Kemajuan Pelaksanaan Keuangan Menurut Jenis Kegiatan s.d Desember 2019

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa dalam rangka pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha,

dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja. Sesuai dengan kewajiban yang digariskan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Balai Diklat LHK Pematangsiantar menyusun laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Penyusunan LKj dimaksud sebagai pertanggungjawaban secara administrasi baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019. Adapun tujuan dari penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang.

A. 1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah BDLHK Pematangsiantar 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2015-2019;
10. Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2019;
11. Surat Pengesahan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-029.08.2.237640/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

A. 2. Batasan Pengertian

Dalam LKj Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/sekretariat badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

- 3) Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor, kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
- 5) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
- 6) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
- 7) Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
- 8) Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.
- 9) Misi adalah suatu yang harus diemba atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- 10) Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 11) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu
- 12) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan.
- 13) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat LHK Pematangsiantar adalah unit pelaksana teknis dibidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi sebagai berikut:

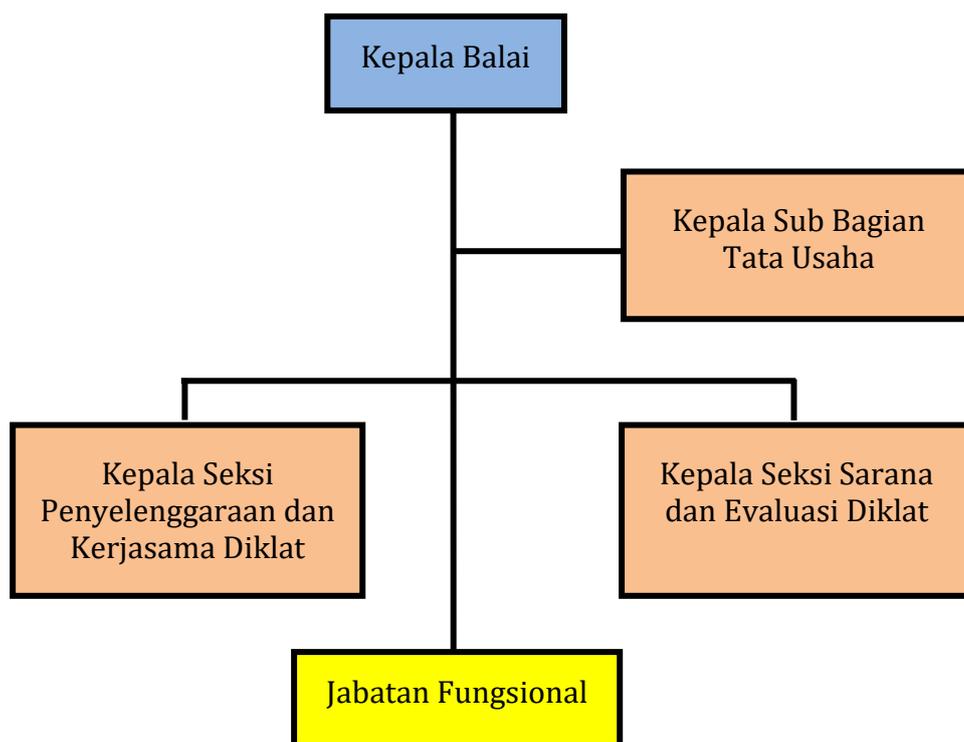
- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi di atas, Balai Diklat LHK Pematangsiantar terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
3. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan serta pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing–masing berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

C. Sumber Daya Manusia

Balai Diklat LHK terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, dan Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Struktur organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

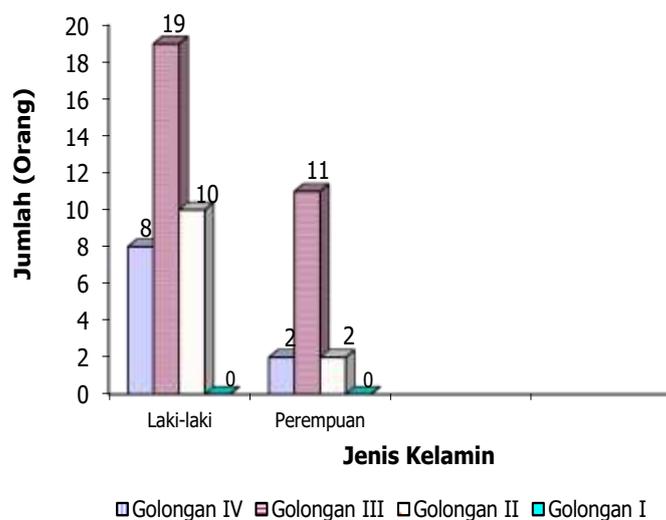


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Jumlah pegawai BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 (data pada Bulan Desember 2019) adalah sebanyak 76 orang, terdiri dari 52 orang PNS, 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan 2 orang Tenaga Bakti Rimbawan. Adapun PNS di BDLHK Pematangsiantar terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 orang, Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 11 orang, Fungsional Umum sebanyak 36 orang dan Tenaga Penyuluh Kehutanan 1 orang. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

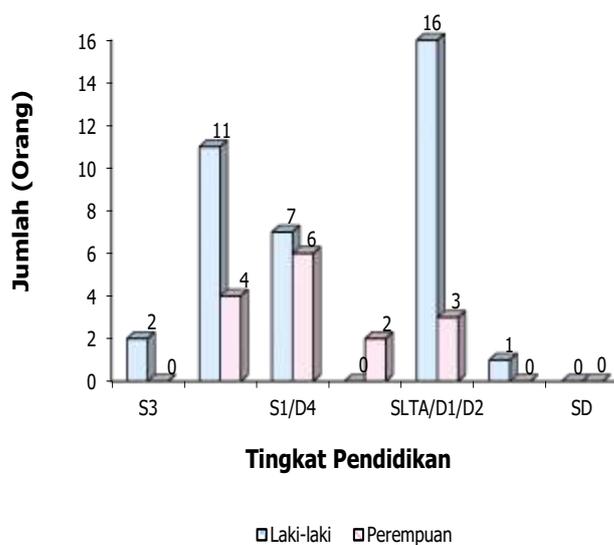
NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	Golongan IV	8	2	10
2	Golongan III	19	11	30
3	Golongan II	10	2	12
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		37	15	52



Gambar 2. Grafik jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Tabel 2. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

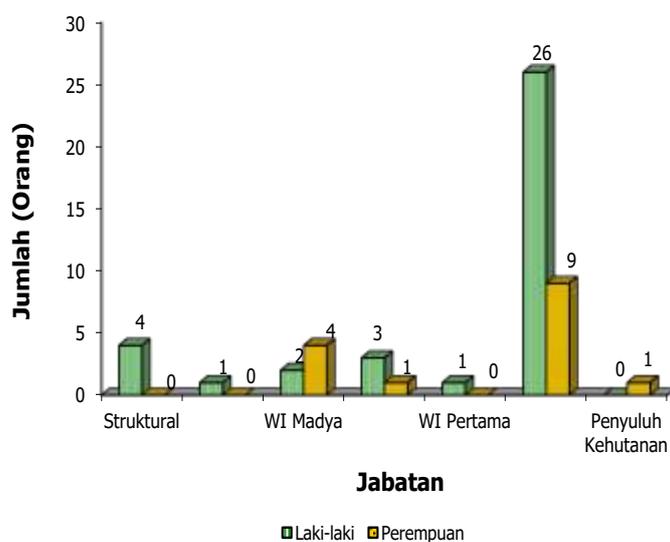
NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	S3	2	-	2
2	S2	11	4	15
3	S1/D4	7	6	13
4	D3	-	2	2
5	SLTA/D1/D2	16	3	19
7	SLTP	1	-	1
8	SD	-	-	-
Jumlah		37	15	52



Gambar 3. Grafik jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 3. Jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

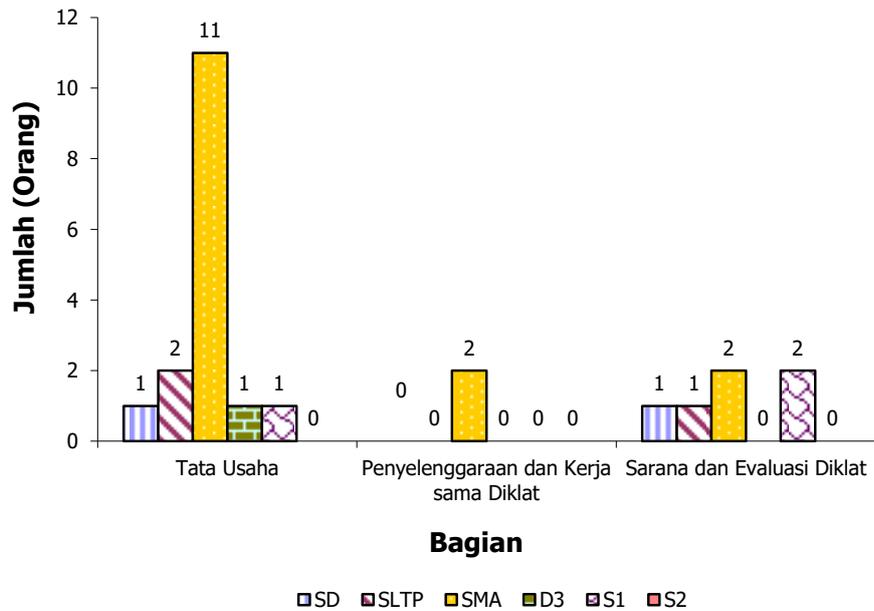
NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	Struktural	4	-	4
2	WI Utama	1	-	1
3	WI Madya	2	4	6
4	WI Muda	3	1	4
5	WI Pertama	1	-	1
6	Fungsional Umum	26	9	35
7	Penyuluh Kehutanan	-	1	1
Jumlah		37	15	52



Gambar 4. Grafik jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

Tabel 4. Keadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2019 di BDLHK Pematangsiantar

NO.	BAGIAN	PENDIDIKAN						JLH	KET
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2		
1	Tata Usaha	1	2	11	1	1	-	16	
2	Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat	-	-	2	-	-	-	2	
3	Sarana Dan Evaluasi Diklat	1	1	2	-	2	-	6	
JUMLAH		2	2	16	1	3	-	24	



Gambar 5. Grafik keadaan PNP di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan

1. Sarana dan Prasarana

1) Kantor dan Asrama BDLHK Pematangsiantar

Untuk mendukung kelancaran tugas, BDLHK Pematangsiantar dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan sarana transportasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sarana dan prasarana kantor dan asrama BDLHK Pematangsiantar

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
	TANAH/GEDUNG/BANGUNAN				
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	17,452	M2	v	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11,762	M2	v	
3	Gedung Pos Penjaga Permanen	3	Unit	v	
4	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya/Rumah Jaga Genset	38	M2	v	
5	Gedung Pos Jaga Permanen/Pos Keamanan KHDTK	2	Unit	v	
	PERALATAN DAN MESIN				
1	Portable Generating Set	1	Unit	v	
2	Full Body Harness	2	Unit	v	
3	Tali Kamantel Static	2	Unit	v	
4	Seat Harness	2	Unit	v	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
5	Descender Figure og Eight	2	Unit	v	
6	Webbing	1	Unit	v	
7	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Unit		v
8	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Unit	v	
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Unit	v	
10	Pick Up	2	Unit	v	
11	Sepeda Motor	8	Unit	v	
12	Peralatan Tukang Besi Lainnya	2	Buah	v	
13	Alat Ukur Lainnya	2	Buah	v	
14	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4	Buah	v	
15	Lemari Besi/Metal	19	Buah	v	
16	Lemari Kayu	110	Buah	62	48
17	Rak Besi	4	Buah	v	
18	Rak Kayu	26	Buah	v	
19	Filing Cabinet Besi	57	Buah	54	3
20	Brandkas	4	Buah	v	
21	Movitex Board	2	Buah	v	
22	White Board	8	Buah	v	
23	Copy Board/Elektric White Board	1	Buah	v	
24	Mesin Absensi	1	Buah	v	
25	LCD Projector/Infocus	5	Buah	v	
26	Flip Chart	6	Buah	v	
27	Perkakas Kantor Lainnya	65	Buah	33	32
28	Meja Kerja Besi/Metal	133	Buah	v	
29	Meja Kerja Kayu	355	Buah	133	222
30	Kursi Besi/Metal	318	Buah	v	
31	Kursi Kayu	202	Buah	v	
32	Sice	11	Buah	v	
33	Meja Rapat	41	Buah	v	
34	Meja Komputer	16	Buah	v	
35	Tempat Tidur Kayu	44	Buah	v	
36	Meja Ketik	3	Buah	2	1
37	Kasur/Spring Bed	97	Buah	v	
38	Meja Makan Kayu	68	Buah	v	
39	Nakas	1	Buah	v	
40	Meja Tamu Asrama	22	Unit	v	
41	Kursi tamu Asrama	66	Unit	v	
42	Meja Hidang (dapur)	1	Unit	v	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
43	Meja Tempat Snack	3	Unit	v	
44	Meja Hidang (dapur)	1	Unit	v	
45	Sofa Kantor	3	Unit	v	
46	Kursi Kantor	2	Unit	v	
47	Kursi tamu Asrama	30	Unit	v	
48	Meja Tamu Asrama	10	Unit	v	
49	Kursi Kantor	2	Unit	v	
50	Pemanas Nasi	3	Unit	v	
51	Mesin Pompa Air	1	Unit		v
52	Tempat Penampungan Sementara	1	Unit	v	
53	Rak Piring Alumunium	1	Buah	v	
54	Televisi+Parabola	4	Buah	v	
55	Lemari Es	3	Buah	v	
56	Timbangan Barang(kapasitas 150 kg)	1	Buah	v	
57	Peralatan Outbond	2	Buah	v	
58	Jam Elektronik	4	Buah	v	
59	Digital LED Running Text	1	Buah	v	
60	Dispenser	6	Buah	v	
61	Blender	1	Buah	v	
62	Kompom Gas (Alat Dapur)	4	Buah	v	

2) KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pondok Buluh yang merupakan sarana pembelajaran pendukung kegiatan kediklatan di BDLHK Pematangsiantar dan ada sejak tahun 1985. Ketika itu, areal yang dimaksud merupakan Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) di Kabupaten Simalungun.

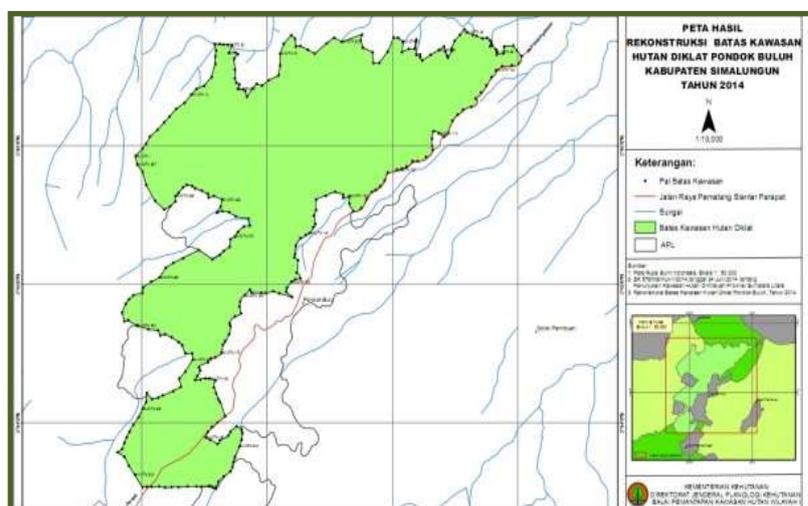
Selanjutnya, oleh Dirjen Kehutanan ditunjuk sebagai Hutan Diklat melalui SK Dirjen Kehutanan Nomor: 34/KPTS/DJ/I/1983 Tanggal 8 Februari 1983 dengan luas \pm 800 Ha. Pada Tahun 1988, Hutan Diklat ini mendapatkan tambahan areal seluas \pm 300 Ha berdasarkan SK Menhut Nomor: 398/Kpts/1988 Tanggal 4 Agustus 1988. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1030/Menhut-VII/KUH/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Hutan Lindung, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Hutan Diklat Pondok Buluh seluas 1.272,70 Ha, sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

Beberapa jenis flora yang banyak dijumpai di lapangan diantaranya Pinus, Meranti, Puspa, Rasamala, Sampinur, Hapas-Hapas, Aren, Kemenyan, Bambu, Medang, Mayang, Anggrek Hutan, dan lain sebagainya. Potensi satwa pada umumnya belum terinventarisir dengan baik, tetapi hasil pengamatan yang sudah pernah dilakukan dan frekwensi kemunculan, yang sering terlihat antara lain Monyet, Siamang, Rusa, Burung Elang, Lipan, Biawak, Burung Balam, Ular, Kadal, Babi Hutan, Ayam Hutan, Burung Enggang, Trenggiling, dan lain-lain.

Sarana prasarana penunjang diklat di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh yang pengelolaannya berada di bawah BDLHK Pematangsiantar terdiri dari demplot persemaian seluas 1 Ha, demplot agroforestry seluas 4 Ha, demplot hasil hutan bukan kayu (HHBK) seluas 2 Ha, arboretum seluas 2 Ha, demplot meranti seluas 2 Ha, demplot pengawetan tanah seluas 2 Ha, areal demplot MPTS dan demplot lebah madu, serta jalur interpretasi pengamatan burung sepanjang 1 Km.

KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh adalah salah satu kawasan yang dilintasi apabila menuju kawasan wisata Danau Toba. Pondok Buluh juga memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai destinasi kegiatan wisata khususnya untuk mendukung Program Otortitas Kawasan Danau Toba, antara lain *Outbound, Climbing, Trekking, Bird Watching* dan jenis kegiatan wisata lainnya.



Gambar 6. Peta KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

Sarana dan prasarana KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang kediklatan, secara umum sarana dan prasarana KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana dan prasarana KHDTK HD Pondok Buluh pada Tahun 2019

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Ruang Kelas	2	Unit	v	
2	Ruang Makan/Snack	1	Unit	v	
3	Dapur	1	Unit	v	
4	Asrama	1	Unit	v	
5	Mushola	1	Unit		v
6	Gudang	1	Unit		v
7	Pos Jaga	2	Unit	v	v
8	Pondok Kerja	1	Unit		v
9	Demplot Persemaian	1	Ha	v	
10	Demplot Agroforestry	4	Ha	v	
11	Demplot Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2	Ha	v	
12	Demplot Meranti	2	Ha	v	
13	Demplot Pengawetan Tanah	2	Ha	v	
14	Arboretum	2	Ha	v	
15	Petak Ukur Permanen	1	Ha	v	
16	Demplot Tanaman Obat	1	Ha	v	
17	Areal Camping Ground	2	Ha	v	
18	Jalur Tracking	3	Km	v	
19	Sarana Prasarana Outbond	1	Set	v	
20	Demplot MPTS	1,5	Ha	v	
21	Demplot Lebah Madu	1	Ha	v	
22	Pompa Pemadam	2	Unit	v	
23	Selang Pemadam	7	Unit	v	
24	Nozel Kuningan Pernekel (Sambu Ponti)	2	Unit	v	
25	Jet shooter	9	Unit	v	



Gambar 7. Sarana-Prasarana di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Diklat LHK Pematangsiantar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan diklat yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepemimpinan, teknis, dan administrasi yang memiliki komitmen dan moralitas yang tinggi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan diklat bagi SDM LHK baik aparatur dan non aparatur (masyarakat). Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparatur dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibutuhkan saat ini adalah SDM yang memiliki 4 kriteria, yaitu:

- (1) integritas moral yang tinggi (jujur),
- (2) kemampuan profesionalisme,
- (3) kemampuan kepemimpinan (*leadership*), dan
- (4) kemampuan bekerja sama dalam tim yang solid.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2015-2019 adalah "Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat dan menuju pada pembangunan berkelanjutan."

Rencana Strategis BDLHK Pematangsiantar tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2015-2019 ditampung dalam Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Program	Out come
<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH dan Koperasi • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang. • Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan Negara. • Meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem.

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM Tahun 2015-2019 yang berkaitan dengan IKK pada Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Program	Indikator Kinerja Utama BP2SDM	Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM
1. Program peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH dan Koperasi • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang. • Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 35.000 orang • Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) 340 orang • Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan sebanyak 7 unit KHDTK • Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang

Keterangan:

Indikator Kinerja Kegiatan yang dicetak tebal merupakan IKK BP2SDM yang sesuai dengan IKK Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2015-2019.

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 mengacu pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rencana Kerja Tahunan BDLHK Pematangsiantar Tahun 2015-2019

Kegiatan/Unit Kegiatan /ElemenKegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)									
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)									
	Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai criteria dan standar pengelolaan 7 unit	Pengelolaan KHDTK	Unit	-	-	1	-	-	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Penyelenggaraan Diklat Teknis (EK1)									
	Terselenggaranya diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	Penyelenggaraan Diklat Teknis	Orang	600	240	300	450	450	
	Terselenggaranya diklat bakti rimbawan sebanyak 15.000 orang	Penyelenggaraan Diklat Bakti Rimbawan	Orang	-	30	-	30	30	
	Terselenggaranya diklat tenaga pendamping KTH sebanyak 5.500 orang	Penyelenggaraan Diklat Pendamping KTH	Orang	60	60	30	60	60	
Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
	Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 1355 orang	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	Orang	30	30	60	60	60	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)									
Diklat Administrasi (EK2)									
	Terselenggaranya diklat administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 864 orang	Penyelenggaraan Diklat Administrasi	Orang	-	-	-	30	30	
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)									
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)									
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup (EK1)									
	Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pelatihan Generasi Muda LH	Orang	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan (EK2)									
	Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	Jumlah pelatihan Generasi Muda kehutanan	Orang	-	-	-	-	-	

Elemen Kegiatan	Sasaran EK	Indikator Elemen Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar)					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (EK1)													
		Terselenggaranya Diklat Kerjasama dengan Pihak Swasta											
		a. Jumlah tenaga kerja di sektor swasta meningkat kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Terselenggaranya Diklat Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah											
		a. Jumlah tenaga di Instansi Pemerintah Daerah meningkat kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan											
		a. Jumlah tenaga kediklatan meningkat kapasitasnya	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	0,207	0,106	0,106	0,106	0,106	
		b. Jumlah tenaga fungsional kediklatan meningkat kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Meningkatnya kemampuan organisasi dalam mengembangkan system perencanaan penyelenggaraan diklat LHK											
		a. Dokumen penyusunan program diklat	1 dok	-	-	-	-	0,057	0,022	0,022	0,022	0,022	
		b. Dokumen penyusunan Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004	
		c. Dokumen RKAKL dan POK	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	0,121	0,103	0,138	0,138	0,138	
		d. Dokumen Rencana Strategis	-	1 dok	-	-	-	-	0,012	-	-	-	
		e. Identifikasi Kebutuhan Diklat	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	0,068	0,085	0,085	0,085	
Penyelenggaraan Pengelolaan Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan (EK2)													
		Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang sesuai harapan											
		a. Pengadaan sarana dan prasarana diklat	459 unit	92 unit	-	-	-	2,064	0,209	-	-	-	
		b. Rehabilitasi sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Elemen Kegiatan	Sasaran EK	Indikator Elemen Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar)					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		kediklatan											
		c. Buku perpustakaan	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	0,025	0,025	
		Terselenggaranya pengembangan publikasi dan informasi kediklatan											
		a. Penerbitan majalah	2 edisi	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048					
		b. Penerbitan leaflet/booklet/poster/banner/video/stofmap info diklat	1 dok	0,073	0,084	0,084	0,084	0,084					
		c. Penerbitan kalender	1 dok	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018					
		d. Pengelolaan website	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Terselenggaranya pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan											
		a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat	1 dok	0,011	0,019	0,020	0,023	0,023					
		b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	0,001	0,028	0,031	0,033	0,035					
		c. Laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)	20 lap	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019					
		d. Laporan diklat dan statistik	23 lap	13 lap	13 lap	21 lap	21 lap	0,016	0,009	0,009	0,015	0,015	
		e. Evaluasi Pasca Diklat	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	0,069	-	0,069	0,069	0,069	
		Meningkatnya pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal											
		a. Jumlah tenaga pengamanan KHDTK meningkat	6 kali	3 kali	3 kali	6 kali	6 kali	0,057	0,019	0,019	0,057	0,057	
		b. Jumlah demplot	1 unit	3 unit	5 unit	-	-	0,028	0,055	0,075	-	-	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar (EK3)													
		Terselenggaranya pengelolaan perkantoran yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan											
		a. Pelaksanaan layanan perkantoran (gaji, tunjangan)	12 bln	4,586	6,262	6,262	6,262	6,262					

Elemen Kegiatan	Sasaran EK	Indikator Elemen Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar)					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Pelaksanaan operasional perkantoran	1 dok	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600					
		c. Pengelolaan keuangan (SAI, SAIBA)	14 lap	-	-	-	-	-					
		d. Pengelolaan barang milik negara (SIMAK-BMN)	3 lap	-	-	-	-	-					
		e. Dokumen kepegawaian	1 dok	0,018	0,027	0,018	0,018	0,018					

Rencana kerja (Renja) BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran. Pagu anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 merupakan batas atas belanja dalam penyusunan rencana/usulan kegiatan tahun berjalan. Pagu Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 mengalami perubahan, dimana pagu awal sebesar Rp. 10.451.745.000,- menjadi Rp. 10.956.745.000,-.

Dari alokasi pagu tersebut telah diusulkan rencana kerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 berdasarkan IKK sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. IKK dan pagu defenitif Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	1.589.770.000
		Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	441.140.000
		Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	111.730.000
		Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	76.000.000
		Terealisasinya layanan perkantoran	8.498.105.000
		Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup	240.000.000
JUMLAH			10.956.745.000

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Penetapan kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar telah ditandatangani oleh Sekretaris Badan P2SDM dan Kepala Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada bulan Januari Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang disajikan pada lampiran 1.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Tahun 2019, Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami penambahan anggaran dari Rp. 10.451.745.000,- (Sepuluh milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.956.745.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) karena terjadi kekurangan pada pembayaran gaji dan tunjangan. Namun sejalan dengan penambahan anggaran tersebut, tidak menyebabkan perubahan dalam output IKK BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019.

Pengukuran Kinerja Badan P2SDM didasarkan pada komponen pengukuran capaian kinerja, efektivitas capaian kinerja dan efisiensi capaian kinerja.

Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar didasarkan pada tiga komponen pengukuran yaitu:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Efektivitas Capaian Kinerja
- c. Efisiensi Capaian Kinerja

Adapun uraian setiap komponen pengukuran capaian kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2019, Balai Diklat LHK Pematangsiantar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan yang akan dicapai dengan enam indikator kinerja kegiatan. Capaian realisasi pada akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa target semua indikator kinerja kegiatan tercapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Hasil pengukuran rata-rata kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada Tahun

2019 adalah sebesar 99,68 %. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil pengukuran capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019

Program	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		% Capaian
			Jlh	Sat	Jlh	Sat	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	300	orang	300	orang	99,54
		Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	1	unit	1	unit	99,79
		Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	30	orang	30	orang	99,61
		Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	1	layanan	1	layanan	99,48
		Terealisasinya layanan perkantoran	1	layanan	1	layanan	99,69
		Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup	120	Orang	120	Orang	100
		Rata-rata capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019					

b. Efektivitas Capaian Kinerja

Hasil pengukuran efektivitas capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Vol/Sat	Realisasi Thn 2018	Realisasi Thn 2019	% Capaian Thn 2018	% Capaian Thn 2019	Efektivitas Capaian Kinerja
Peningkatan Penyaluran dan Pengembangan SDM	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	Org	330	300	100	100	1
		Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	Unit	1	1	99,35	100	1,01
		Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Org	30	30	100	100	1
		Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	0	1	0	100	1
		Terealisasinya layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	1	100	100	1
		Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup	Org	540	120	100	100	1
		Rata-rata Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2019						98,87

Berdasarkan Tabel 12, menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada Tahun 2019 = 1. Rasio = 1 ini menunjukkan bahwa efektivitas capaian kinerja tahun berjalan adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya.

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Hasil pengukuran efisiensi capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja Fisik	% Capaian Kinerja Keuangan	Efisiensi Capaian Kinerja
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	100	99,54	1,00
		Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	100	99,79	1,00
		Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	100	99,61	1,00
		Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	100	99,48	1,01
		Terealisasinya layanan perkantoran	100	99,69	1,00
		Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup	100	100	1,00
Rata-rata Efisiensi Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2019			100	99,68	1,00

Tabel 13 menunjukkan bahwa rasio efisiensi seluruh indikator kinerja utama memiliki nilai antara 1,00 s/d 1,01 dengan rata-rata sebesar 1,00 (artinya > 1). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kinerja BDLHK Pematangsiantar sudah efisien.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan indikator kegiatan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

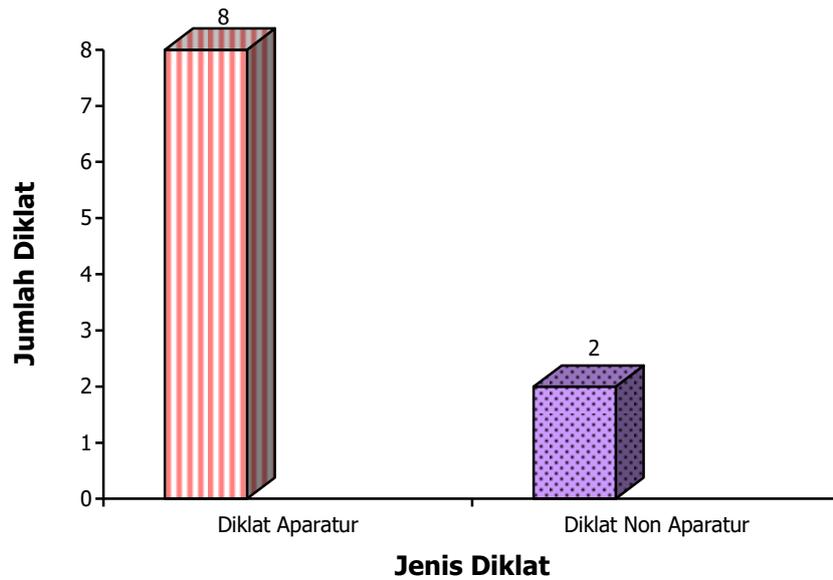
a. Meningkatkan kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK (300 orang)

Pada penetapan kinerja Tahun 2019, target peningkatan kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang dilaksanakan melalui diklat adalah 300 orang ditambah dengan diklat kerja sama dengan instansi lain sebanyak 462 orang. Pada pelaksanaannya, jumlah SDM yang mengikuti diklat adalah sebanyak 300 orang, yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019, dan 462 orang dari diklat kerja sama yang dananya bersumber dari instansi lain. Realisasi jumlah peserta diklat Tahun 2019 yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar serta jumlah peserta diklat kerja sama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi diklat yang bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019

No.	Nama Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi			Jlh
				L	P		
1	Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Masyarakat (NAP)	6	30	30	0	30	14-19 Pebruari
2	SIG Berbasis Ponsel (AP)	6	30	19	11	30	11-16 Maret
3	Teknik Pemetaan Pohon (AP)	5	30	26	4	30	25-29 Maret
4	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan (AP)	6	30	27	3	30	8-13 April
5	Pencegahan Kebakaran Hutan (AP)	8	30	29	1	30	23-30 April
6	Pengenalan Jenis Kayu (AP)	6	30	29	1	30	22-27 Juli
7	Alih Tingkat Polhut Terampil ke Polhut Ahli (AP)	10	30	29	1	30	14-23 Agustus
8	Teknik Budidaya Lebah Madu (NAP)	6	30	27	3	30	9-14 September
9	Budidaya Lebah Madu (AP)	6	30	19	11	30	16-21 September
10	Pembuatan Bokashi (AP)	6	30	24	6	30	23-28 September

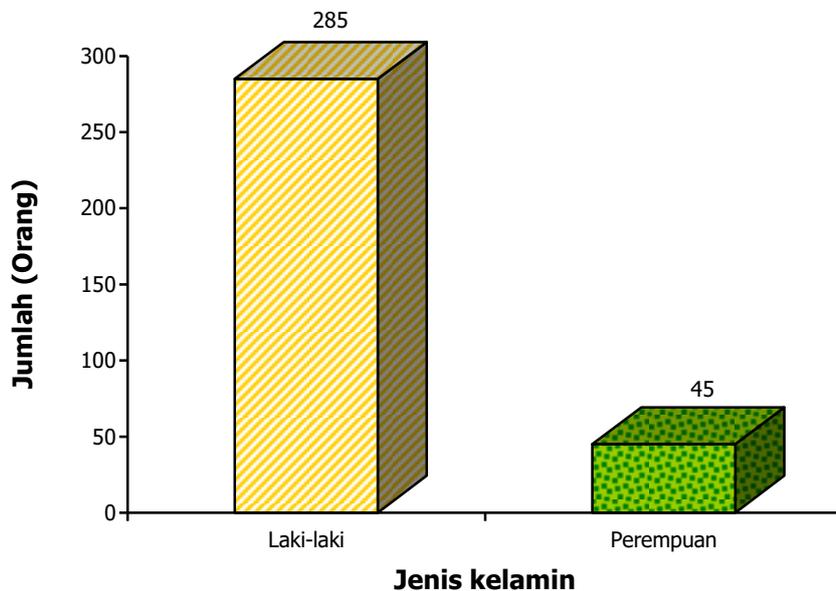
Keterangan: AP : Aparatur Pemerintah; NAP : Non Aparatur Pemerintah



Gambar 8. Grafik Perbandingan Jumlah Diklat Bagi Aparatur dan Non Aparatur

Tabel 15. Peserta diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin

APARATUR (A)		NON APARATUR (NA)				Jumlah		TOTAL
Aparatur		Non Aparatur		Pendampingan KTH		A + NA		
L	P	L	P	L	P	L	P	
202	38	57	3	26	4	285	45	330



Gambar 9. Grafik peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16. Realisasi diklat kerjasama pada BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019

No.	Nama Diklat	Peserta		Waktu Pelaksanaan	Lama Pelaksanaan (Hari)	Sumber Dana	Kerja Sama dengan Instansi
		Akt	Org				
1	Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba	1	40	15-31 Januari	15	Dana pribadi peserta	BP2HP Wilayah II Medan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Aceh-Sumut
2	Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba	1	14	15-31 Januari	15	Dana pribadi peserta	BP2HP Wilayah II Medan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Aceh-Sumut
3	Fasilitator Proyek Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem	1	36	18-22 Maret	5	KFW	BBTNGL-KFW-BDLHK Pematangsiantar
4	Analisis Hasil SMART Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	30	25-29 Maret	5	WCS	BBTNGL, WCS (Wild Conservation Society)/PI-BDLHK Pematangsiantar
5	Teknik Pengendalian Karhutla Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Kawasan	1	30	8-13 April	6	PT. TPL	APHI Komda Sumut-Aceh dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
6	Pendampingan Perhutanan Sosial (Angkatan IV, V, dan VI)	3	96	8-11 Juli	4	Balai PSKL	PSKL Wilayah Sumatera-BDLHK Pematangsiantar
7	Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan VII	1	24	27-31 Agustus	5	Balai PSKL	PSKL Wilayah Sumatera-BDLHK Pematangsiantar

No.	Nama Diklat	Peserta		Waktu Pelaksanaan	Lama Pelaksanaan (Hari)	Sumber Dana	Kerja Sama dengan Instansi
		Akt	Org				
8	Pembentukan Polisi Kehutanan (Tingkat Ahli dan Tingkat Terampil)	1	30	10 Oktober-23 Desember	75	Dinas Kehutanan Provinsi Sumut	Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara-Binmas-Polda Sumut-BDLHK Pematangsiantar
9	Penjenjangan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Jenjang Madya	1	30	16-24 Oktober	9	Pusdiklat SDM LHK	Pusdiklat SDM-BDLHK Pematangsiantar
10	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan 3 Angkatan 1 & 2	2	68	12 Nopember 2019-15 Januari 2020	51	Dana pribadi peserta	BKD Kab. Nias-BDLHK Pematangsiantar
11	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan 3 Angkatan 3 & 4	2	69	2 Desember 2019-8 Pebruari 2020	51	Dana pribadi peserta	BKD Kab. Nias-BDLHK Pematangsiantar
TOTAL		462					

Diklat kerja sama dilegalitaskan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja sama antara BDLHK Pematangsiantar dengan instansi bersangkutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelaksanaan diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019:



Gambar 10. Diklat Pengenalan Jenis Kayu



Gambar 11. Diklat Alih Tingkat Polhut Terampil ke Polhut Ahli



Gambar 12. Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan IV, V, dan VI



Gambar 13. Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Tingkat Ahli Jenjang Madya



Gambar 14. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan 3 Angkatan 3 & 4

Selain penyelenggaraan diklat, upaya peningkatan SDM dan aparatur di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 dilakukan dengan berbagai komponen pendukung, antara lain:

1. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Publikasi Kediklatan yang meliputi Leaflet, Majalah/Buletin, dan Pembuatan *Banner*/Spanduk/Baliho dan Papan Informasi.
3. Laporan Kegiatan dan Pembinaan yang meliputi Sistem Pengawas Internal Pemerintah (SPIP), *Capacity Building*, Pengembangan Organisasi, Orasi Ilmiah Widyaiswara, Dialog Multipihak dan Membangun Kesepahaman Bersama dalam Pengelolaan KHDTK Pondok Buluh, dan Akreditasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar.



Gambar 15. *Capacity Buliding* Balai Diklat LHK Pematangsiantar di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh



Gambar 16. Praktek Kerja Lapangan SMKN Pekanbaru di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh



Gambar 17. Akreditasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar oleh Tim Akreditasi Pusdiklat SDM LHK



Gambar 18. Dialog Multipihak dan Membangun Kesepahaman Bersama dan Pengelolaan KHDTK Pondok Buluh di Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Hal-hal yang menyangkut hak kepegawaian baik itu kenaikan pangkat/golongan, purna tugas (pensiun) serta mutasi pegawai pada Tahun 2019 berjalan baik seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Daftar Pegawai Mutasi Tahun 2019

NO.	NAMA	MUTASI DARI	MUTASI KE
1	Hijan Setiawan, S.Hut	BDLHK Pematangsiantar	BTN Bukit Dua Belas
2	Dita Silvia, A.Md	BDLHK Pematangsiantar	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh

Tabel 18. Daftar Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pada Tahun 2019

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN TERAKHIR	PANGKAT/GOLONGAN BARU
1	Murniaty Matondang, SH	Penata / IIIc	Penata Tk.I/IIIId
2	Juto K. Malau, S.Hut., M.Sc	Penata / IIIc	Penata Tk.I/IIIId

Tabel 19. Daftar Pegawai Pensiun Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN TERAKHIR	TANGGAL PENSIUN
1	Dra. Werdiningsih	Widyaiswara Utama	Mei 2019
2	Wilsasar Silaban	Analisis Data Penyelenggaraan Diklat	Mei 2019

b. Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan (1 Unit)

Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan ditandai dengan terlaksananya kegiatan pendukung, yaitu:

- ✓ Honorarium Tenaga Bakti Rimawan
- ✓ Operasional KHDTK
- ✓ Patroli Pengamanan KHDTK
- ✓ Pemeliharaan Demplot
- ✓ Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK



Gambar 19. Uji Publik Penyusunan RP KHDTK Pondok Buluh di BDLHK Pematangsiantar



Gambar 20. Uji Publik Penyusunan RP KHDTK Pondok Buluh di KHDTK Pondok Buluh

c. Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan (30 Orang)

Kinerja kegiatan ini digambarkan dengan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Diklat Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang terlaksana 100% dengan peserta sebanyak 30 orang.

d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1 Layanan)

Kegiatan layanan sarana dan prasarana internal terdiri dari pengadaan peralatan fasilitas perkantoran lemari arsip, laptop, *scanner*, *LCD proyektor*, dan kipas angin. Seluruh kegiatan fisik terealisasi 100%.

e. Layanan perkantoran (1 Layanan)

Kegiatan layanan perkantoran terdiri dari kegiatan pendukung yaitu Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Seluruh kegiatan fisik terlaksana 100 %.

f. Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup

Pada penetapan kinerja Tahun 2019, target peningkatan kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui pelatihan masyarakat adalah sebanyak 120 orang. Pada pelaksanaannya, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 120 orang, yang dananya bersumber

dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019. Pelatihan masyarakat ini dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Balai Diklat LHK Pematangsiantar (Sumatera Utara), dan Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat). Realisasi jumlah peserta pelatihan masyarakat Tahun 2019 yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Realisasi pelatihan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup Tahun 2019

No.	Jenis Diklat	Rencana		Realisasi			Lama Diklat (hari)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
		Akt	Pst (org)	Akt	Pst (Org)				
					Lk	Pr			
1	Pelatihan Budidaya Lebah Madu	1	40	1	38	2	3	18 s/d 20 Juni 2019	Kab. Sijunjung
2	Pelatihan Teknik Agroforestry	1	40	1	26	14	3	18 s/d 20 Juni 2019	Kab. Sijunjung
3	Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Areal Kerja Perhutanan Sosial	1	40	1	40	0	3	17-19 Juli 2019	K. Tani Martuah dan Koperasi Anggiat Maju Desa Mangumban Jae, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara



Gambar 21. Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Areal Kerja Perhutanan Sosial

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2019, telah diterbitkan Surat Pengesahan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 029.08.2.237640/2019 Tanggal 05 Desember 2018 dengan pagu defenitif sebesar Rp. 10.451.745.000,- (Sepuluh milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sumber dana DIPA tersebut seluruhnya terdiri dari Rupiah Murni (RM). Pagu tersebut mengalami peningkatan pada Bulan September 2019 menjadi Rp. 10.956.745.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sumber dana DIPA tersebut seluruhnya terdiri dari Rupiah Murni (RM). Realisasi anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 tersaji dalam Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi		% Realisasi Fisik
				Keuangan	%	
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	1.589.770.000	1.582.466.056	14,44	14,51
		Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	441.140.000	440.232.321	4,02	4,03
		Meningkatnya kapasitas jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	111.730.000	111.299.733	1,02	1,02
		Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	76.000.000	75.601.000	0,69	0,69
		Terealisasinya layanan perkantoran	8.498.105.000	8.472.183.031	77,32	77,56
		Meningkatnya kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup	240.000.000	240.000.000	2,19	2,19
TOTAL			10.956.745.000	10.921.782.141	99,68	100

Capaian realisasi keuangan BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 10.921.782.141,-** atau **99,68 %**. Sedangkan realisasi fisik sebesar **100 %**. Pencapaian anggaran secara rinci sampai dengan Desember 2019 tersaji pada lampiran 2.

1. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

a) Permasalahan

Penyerapan anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan yang menyebabkan pembayaran uang makan tidak terbayarkan sepenuhnya pada Bulan Desember 2019.

b) Upaya Tindak Lanjut

Upaya yang telah dilakukan BDLHK Pematangsiantar untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan agar tidak terulang pada tahun selanjutnya, yaitu :

- ✓ Meningkatkan komunikasi dan koordinasi disemua lini dengan baik;
- ✓ Membuat perencanaan anggaran yang lebih cermat serta penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik guna mempercepat pelaksanaan anggaran;
- ✓ Peningkatan kemampuan SDM tenaga kediklatan sehingga sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Melakukan pengawasan serta pengendalian yang lebih baik.

BAB IV. PENUTUP

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar merupakan perangkat organisasi atau unit kerja setingkat eselon III pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengukuran capaian kinerja anggaran menunjukkan bahwa dari pagu anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 sebesar Rp. 10.956.745.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 10.921.782.141,- sehingga capaian kinerja anggaran Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebesar 99,68 %. Sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Hasil pengukuran menunjukkan nilai capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2019 adalah 99,68 %. Hasil pengukuran nilai efektifitas capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2019 adalah 1,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2018, efektifitas kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami penurunan, dimana efektifitas capaian kerjanya pada Tahun 2018 adalah 1,01. Namun demikian, Rasio = 1 ini menunjukkan bahwa efektifitas capaian kinerja tahun berjalan adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan hasil pengukuran nilai efisiensi capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,00 (artinya > 1). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kinerja BDLHK Pematangsiantar sudah efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BDLHK Pematangsiantar sebagai salah satu UPT BP2SDM pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BDLHK Pematangsiantar kepada Kepala Badan P2SDM atas program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BDLHK Pematangsiantar, yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja kedepan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin, S.Hut

Jabatan : Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pematangsiantar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, MM

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Desember 2018

Pihak Pertama,



Kamaruddin, S.Hut

NIP. 19730501 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1:	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM Aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang	300 orang
		Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya	1 unit
		Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	30 orang
2:	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan	Jumlah generasi muda lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	120 orang

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK
2. Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

Anggaran

Rp10.451.745.000,-

Pihak Kedua,


Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001



Jakarta, Desember 2018
 Pihak Pertama,


Kamaruddin, S.Hut
NIP. 19730501 199403 1 002

Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2019

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	
029.08.10	PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	10.956.745.000	10.956.745.000	10.921.782.141	100,00	99,68	100,00	100,00
5441	PENYELENGGARAAN DIKLAT APARATUR LHK	10.716.745.000	10.716.745.000	10.681.782.141	97,81	97,49	97,81	97,81
5441.001	JUMLAH SDM APARATUR DAN NON APARATUR YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	1.589.770.000	1.589.770.000	1.582.466.056	14,51	14,44	14,51	14,51
	Jumlah Komponen Utama	1.052.150.000	1.052.150.000	1.048.671.005	9,60	9,57	9,60	9,60
051	Diklat Teknis	1.052.150.000	1.052.150.000	1.048.671.005	9,60	9,57	9,60	9,60
	Jumlah Komponen Pendukung	537.620.000	537.620.000	533.795.051	4,91	4,87	4,91	4,91
054	Pendukung Kediklatan	537.620.000	537.620.000	533.795.051	4,91	4,87	4,91	4,91
5441.003	JUMLAH UNIT KHDTK SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN KEDIKLATAN	441.140.000	441.140.000	440.232.321	4,03	4,02	4,03	4,03
	Jumlah Komponen Pendukung	441.140.000	441.140.000	440.232.321	4,03	4,02	4,03	4,03
051	Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	441.140.000	441.140.000	440.232.321	4,03	4,02	4,03	4,03
5441.005	JUMLAH TENAGA PENDAMPING KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA-DESA HUTAN MENINGKAT KAPASITASNYA	111.730.000	111.730.000	111.299.733	1,02	1,02	1,02	1,02
	Jumlah Komponen Pendukung	111.730.000	111.730.000	111.299.733	1,02	1,02	1,02	1,02
051	Diklat Teknis Tenaga Pendamping KTH	111.730.000	111.730.000	111.299.733	1,02	1,02	1,02	1,02
5441.951	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	76.000.000	76.000.000	75.601.000	0,69	0,69	0,69	0,69
	Jumlah Komponen Pendukung	76.000.000	76.000.000	75.601.000	0,69	0,69	0,69	0,69
053	Pengadaan Peralatan fasilitas Perkantoran	76.000.000	76.000.000	75.601.000	0,69	0,69	0,69	0,69

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1		2	3	4	5	6	7	8
5441.994	LAYANAN PERKANTORAN	8.498.105.000	8.498.105.000	8.472.183.031	77,56	77,32	77,56	77,56
	Jumlah Komponen Pendukung	8.498.105.000	8.498.105.000	8.472.183.031	77,56	77,32	77,56	77,56
001	Gaji dan Tunjangan	6.765.000.000	6.765.000.000	6.740.086.995	61,74	61,52	61,74	61,74
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.733.105.000	1.733.105.000	1.732.096.036	15,82	15,81	15,82	15,82
5443	PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP	240.000.000	240.000.000	240.000.000	2,19	2,19	2,19	2,19
5443.002	Jumlah Generasi Muda Lingkungan Hidup Yang Meningkatnya Kapasitasnya	240.000.000	240.000.000	240.000.000	2,19	2,19	2,19	2,19
	Jumlah Komponen Utama	240.000.000	240.000.000	240.000.000	2,19	2,19	2,19	2,19
053	Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	240.000.000	240.000.000	240.000.000	2,19	2,19	2,19	2,19

Lampiran 3. Data Kemajuan Pelaksanaan Keuangan menurut Jenis Kegiatan s. d. Desember 2019

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
029.08.10	PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM				10.956.745.000	100			100,00			100,00
5441	PENYELENGGARAAN DIKLAT APARATUR DAN NON APARATUR LHK				10.716.745.000	97,64			97,81			97,81
5441.001	JUMLAH KAPASITAS SDM APARATUR DAN NON APARATUR YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	300	Orang		1.589.770.000	14,51			14,51			14,51
051	DIKLAT TEKNIS				1.052.150.000	9,60			9,60			9,60
A	DIKLAT BUDIDAYA LEBAH MADU	1	Angk	115.710.000	115.710.000	1,06	30	100	1,06	30	100	1,06
B	DIKLAT PEMBUATAN BOKASHI	1	Angk	103.570.000	103.570.000	0,95	30	100	0,95	30	100	0,95
C	DIKLAT TEKNIK BUDIDAYA LEBAH MADU	1	Angk	105.840.000	105.840.000	0,97	30	100	0,97	30	100	0,97
D	DIKLAT PENGENALAN JENIS KAYU	1	Angk	96.490.000	96.490.000	0,88	30	100	0,88	30	100	0,88
E	DIKLAT SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS PONSEL	1	Angk	101.880.000	101.880.000	0,93	30	100	0,93	30	100	0,93
F	DIKLAT TEKNIK PEMETAAN POHON	1	Angk	96.810.000	96.810.000	0,88	30	100	0,88	30	100	0,88
G	DIKLAT PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN	1	Angk	123.630.000	123.630.000	1,13	30	100	1,13	30	100	1,13
H	DIKLAT PENGELOLAAN KOLABORATIF KAWASAN HUTAN	1	Angk	112.620.000	112.620.000	1,03	30	100	1,03	30	100	1,03
I	DIKLAT PENGENDALIAN KARHUTLA BAGI MASYARAKAT	1	Angk	100.360.000	100.360.000	0,92	30	100	0,92	30	100	0,92
J	DIKLAT ALIH TINGKAT POLHUT TINGKAT TERAMPIL KE POLHUT TINGKAT AHLI	1	Angk	95.240.000	95.240.000	0,87	30	100	0,87	30	100	0,87
054	PENDUKUNG KEDIKLATAN				537.620.000	4,91			4,91			4,91
A	PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)				2.160.000	0,02			0,02			0,02
521211	Belanja Bahan - Bahan keperluan Penyusunan / Revisi POK	1	Paket	2.160.000	2.160.000	0,02	1	100	0,02	1	100	0,02
B	RENCANA KERJA ANGGARAN				90.215.000	0,82			0,82			0,82
521211	Belanja Bahan - Bahan Keperluan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1	Keg	3.395.000	3.395.000	0,03	1	100	0,03	1	100,00	0,03

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
524111	Belanja Perjalanan Biasa - Rapat, Koordinasi, Konsultasi Program dan Perencanaan - Revisi Anggaran	13 6	OT OT	6.000.000 1.470.000	86.820.000 78.000.000 8.820.000	0,79 0,71 0,08	13 6	100,00 100	0,79 0,71 0,08	13 6	100,00 100,00	0,79 0,71 0,08
C	RENCANA KERJA TAHUNAN				2.000.000	0,02			0,02			0,02
521211	Belanja Bahan - Bahan Keperluan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	1	Keg	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0,02 0,02	1	100,00	0,02	1	100	0,02
D	SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)				9.700.000	0,09			0,09			0,09
521211	Belanja Bahan - Bahan Keperluan Kegiatan	1	Keg	2.500.000	2.500.000 2.500.000	0,02 0,02	1	100	0,02	1	100	0,02
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya Penyempurnaan Dokumen SPIP	24	OK	300.000	7.200.000 7.200.000	0,07 0,07	24	100,00	0,07	24	100	0,07
E	CAPACITY BUILDING				29.657.000	0,27			0,27			0,27
521211	Belanja Bahan - Alat dan Bahan Keperluan Kegiatan - Personal Use - Dokumentasi dan Pelaporan	1 80 1	Keg Org Keg	2.700.000 130.000 357.000	13.457.000 2.700.000 357.000	0,12 0,02 0,00	1 80 1	100 100 100	0,12 0,02 0,00	1 80 1	100 100 100	0,12 0,02 0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Konsumsi Peserta (1 x makan, 1 x Snack) - Uang Saku	80 80	OH Org	50.000 130.000	14.400.000 4.000.000 10.400.000	0,13 0,04 0,09	80 80	100 100	0,13 0,04 0,09	80 80	100 100	0,13 0,04 0,09
522151	Belanja Barang Non Operasional - Honorarium Narasumber	2	OJ	900.000	1.800.000 1.800.000	0,02 0,02	2	100	0,02 0,02	2	100	0,02 0,02
F	PENGEMBANGAN ORGANISASI				304.100.000	2,78			2,78			2,78

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D. BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi/Musbang/Raker Kemenhut - Rapat Konsultasi teknis lingkup Badan P2SDM Kehutanan - Konsultasi Penyelenggaraan Diklat ke Pusat - Konsultasi dan koordinasi ke Medan - Koordinasi ke Wilayah Pelayanan - Konsultasi Kepegawaian ke Pusat - Konsultasi Ketatausahaan ke Pusat - Perjalanan Dalam Rangka Diklat PIM III	8	OT	6.000.000	299.000.000 48.000.000	2,73 0,44	8	100,00	2,73 0,44	8	100,00	2,73 0,44
		7	OT	6.000.000	42.000.000	0,38	7	100,00	0,38	7	100,00	0,38
		4	OT	6.000.000	24.000.000	0,22	4	100,00	0,22	4	100,00	0,22
		100	OT	570.000	57.000.000	0,52	100	100,00	0,52	100	100,00	0,52
		16	OT	4.625.000	74.000.000	0,68	16	100	0,68	16	100,00	0,68
		2	OT	6.000.000	12.000.000	0,11	2	100	0,11	2	100	0,11
		2	OT	6.000.000	12.000.000	0,11	2	100	0,11	2	100	0,11
		5	OT	6.000.000	30.000.000	0,27	5	100	0,27	5	100	0,27
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota	34	OK	150.000	5.100.000 5.100.000	0,05 0,05	34	100	0,05 0,05	34	100,00	0,05 0,05
G	LEAFLET				5.280.000	0,05			0,05			0,05
521211	Belanja Bahan - Belanja Bahan Keperluan Penyusunan Leaflet	1	Keg	1.500.000	1.500.000 1.500.000	0,01 0,01	1	100	0,01 0,01	1	100	0,01 0,01
521213	Honor Output Kegiatan - Honor Tim Penyusunan leaflet	1	Judul	1.280.000	1.280.000 1.280.000	0,01 0,01	1	100	0,01 0,01	1	100	0,01 0,01
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi - Pencetakan Leaflet, 1 Judul	500	Eks	5.000	2.500.000 2.500.000	0,02 0,02	500	100	0,02 0,02	500	100	0,02 0,02
H	MAJALAH/BULETIN				23.780.000	0,22		100	0,22			0,22
521211	Belanja bahan - Bahan Keperluan Penyusunan Majalah	1	Edisi	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0,02 0,02	1	100	0,02 0,02	1	100	0,02 0,02
521213	Belanja Honor Output Kegiatan - Honorarium Tim Penyusunan Majalah - Honorarium Pembuat Artikel	1 60	Edisi Hal	1.280.000 50.000	4.280.000 1.280.000 3.000.000	0,04 0,01 0,03	1 60	100 100	0,04 0,01 0,03	1 60	100 100	0,04 0,01 0,03
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Pencetakan Majalah	250	Eks	70.000	17.500.000 17.500.000	0,16 0,16	250	100	0,16 0,16	250	100	0,16 0,16
I	ORASI ILMIAH WIDYAISWARA				41.188.000	0,38			0,38			0,38

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
521211	Belanja Bahan - ATK, Bahan Orasi dan Penggandaan - Orasi Kit	1 35	Keg Orang	2.000.000 100.000	5.500.000 2.000.000 3.500.000	0,05 0,02 0,03	1 35	100 100	0,05 0,02 0,03	1 35	100 100	0,05 0,02 0,03
521213	Belanja Honor Output Kegiatan - Honor Narasumber - Honorarium Narasumber Pra Orasi Eselon II, 1 Orang, 2 OJ - Tim Reviewer - Honorarium Narasumber Eselon II, 2 orang, 2 OJ	2 4	OJ OJ	1.000.000 1.000.000	6.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000	0,05 0,02 0,02 0,04 0,04	2 4	100 100	0,05 0,02 0,04	2 4	100 100	0,05 0,02 0,04
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Konsumsi Peserta - Biaya Orasi	30 1	Orang Keg	100.000 10.488.000	13.488.000 3.000.000 10.488.000	0,12 0,03 0,10	30 1	100 100	0,12 0,03 0,10	30 1	100 100	0,12 0,03 0,10
524111	Belanja Perjalan Dinas Biasa - Perjalan Orasi	2	OT	8.100.000	16.200.000 16.200.000	0,15 0,15	2	100	0,15	2	100	0,15
J	DIALOG MULTIPIHAK DAN KESEPAHAMANBERSAMA DALAM PENGELOLAAN KHDTK PONDOK BULUH				7.665.000	0,06			0,07			0,07
521211	Belanja Bahan - ATK Keperluan Kegiatan - Spanduk	1 11	Keg Mtr	2.500.000 75.000	3.325.000 2.500.000 825.000	0,03 0,02 0,01	1 1	100 100	0,03 0,02 0,01	1 11	100 100	0,03 0,02 0,01
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Konsumsi Peserta (1 x makan, 2 x snack)	70	Org	62.000	4.340.000 4.340.000	0,04 0,04	1	100	0,04	70	100	0,04
K	AKREDITASI BALAI DIKLAT LHK PEMATANGSIANTAR				5.000.000	0,05			0,05			0,05
	- Biaya Akreditasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar	1	Keg	5.000.000	5.000.000	0,05	1	100	0,05	1	100	0,05
L	PEMBUATAN BANNER / SPANDUK / BALIHO DAN PAPAN INFORMASI				16.875.000	0,16			0,15			0,15
521211	Belanja Bahan - Pembuatan Banner / Spanduk / Baliho dan Papan Informasi	1 225	Keg Mtr	75.000	16.875.000 16.875.000	0,16 0,15	225	100	0,15 0,15	225	100	0,15 0,15

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5441.003	JUMLAH UNIT KHDTK SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN KEDIKLATAN	1	Unit		441.140.000	4,03			4,03		4,03	
051	PENGEMBANGAN KHDTK SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN KEDIKLATAN				441.140.000	4,03			4,03		4,03	
A	HONORARIUM BAKTI RIMBAWAN				148.800.000	1,36			1,36		1,36	
521213	Honor Output Kegiatan - Honorarium Bakti Rimbawan (4 Orang x 13 Bulan)	48	Bulan	3.100.000	148.800.000 148.800.000	1,36 1,36	48	100,00	1,36 1,36	48	100,00	1,36 1,36
B	OPERASIONAL KHDTK				72.532.000	0,66			0,66		0,66	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya Operasional Pengelolaan KHDTK	12	Bulan	4.791.000	61.332.000 57.492.000	0,56 0,52	12	100,00	0,56 0,52	12	100,00	0,56 0,52
	- Biaya Operasional Penyuluh	12	Bulan	320.000	3.840.000	0,04	12	100,00	0,04	12	100,00	0,04
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Biaya perjalanan ke KHDTK	10	OT	1.120.000	11.200.000 11.200.000	0,10 0,10	10	100	0,10	10	100,00	0,10 0,10
C	PATROLI				30.000.000	0,27			0,27		0,27	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Honor Patroli	100	OT	300.000	30.000.000 30.000.000	0,27 0,27	100	100,00	0,27	100	100,00	0,27 0,27
D	PEMELIHARAAN DEMPLOT				60.540.000	0,55			0,55		0,55	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pemeliharaan Demplot Persemaian	12	Bulan	1.000.000	60.540.000 12.000.000	0,55 0,11	12	100,00	0,55 0,11	12	100,00	0,55 0,11
	- Pemeliharaan TPS	12	Bulan	1.000.000	12.000.000	0,11	12	100,00	0,11	12	100,00	0,11
	- Pemeliharaan Demplot MPTS	12	Bulan	1.000.000	12.000.000	0,11	12	100,00	0,11	10	100,00	0,11
	- Pemeliharaan Jalur Tracking	12	Bulan	1.045.000	12.540.000	0,11	12	100,00	0,11	10	100,00	0,11
	- Pemeliharaan Demplot Lebah Madu	12	Bulan	1.000.000	12.000.000	0,11	12	100,00	0,11	10	100,00	0,11
E	PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KHDTK	1	Keg	81.960.000	81.960.000	0,75	1	100	0,75	1	100,00	0,75
F	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KHDTK, 2 KEGIATAN	2	Keg	47.308.000	47.308.000	0,43	2	100	0,43	2	0,43	0,43
5441.005	JUMLAH TENAGA PENDAMPING KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA-DESA HUTAN MENINGKAT	30	Org		111.730.000	1,02			1,02		100	1,02

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET 1 TAHUN	HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D. BULAN INI			
				ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KAPASITASNYA											
051	DIKLAT TEKNIS TENAGA PENDAMPING KTH			111.730.000	1,02			1,02		100	1,02	
A	DIKLAT PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN	1	Angk	111.730.000	1,02	30	100	1,02	30	100	1,02	
5441.951	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	1	Layanan	76.000.000	0,69			0,69			0,69	
053	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN			76.000.000	0,69			0,69			0,69	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			76.000.000	0,69			0,69			0,69	
	- Lemari Arsip	6	Unit	4.250.000	25.500.000	0,23	6	100	0,23	6	100	0,23
	- Laptop	2	Unit	14.200.000	28.400.000	0,26	2	100	0,26	2	100	0,26
	- Scanner	1	Unit	5.100.000	5.100.000	0,05	1	100	0,05	1	100	0,05
	- LCD Proyektor	1	Unit	13.700.000	13.700.000	0,13	1	100	0,13	1	100	0,13
	- Kipas Angin	3	Unit	1.100.000	3.300.000	0,03	1	100	0,03	1	100	0,03
5441.994	LAYANAN PERKANTORAN	1	Layanan	8.498.105.000	77,39			77,56			77,56	
001	GAJI DAN TUNJANGAN			6.765.000.000	61,58			61,74			61,74	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			6.765.000.000	61,58			61,74			61,74	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			2.796.767.000	25,53			25,53			25,53	
	- Belanja Pokok Gaji PNS	1	Tahun	2.396.236.000	2.396.236.000	21,87	12	100,00	21,87	12	100,00	21,87
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	195.386.000	195.386.000	1,78	1	100	1,78	1	100	1,78
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	205.145.000	205.145.000	1,87	1	100	1,87	1	100	1,87
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			40.000	0,00			0,00			0,00	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	32.000	32.000	0,00	12	100,00	0,00	12	100,00	0,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	4.000	4.000	0,00	1	100	0,00	1	100	0,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	4.000	4.000	0,00	1	100	0,00	1	100	0,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			246.435.000	2,25			2,25			2,25	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	Tahun	211.474.000	211.474.000	1,93	12	100,00	1,93	12	100,00	1,93
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	17.001.000	17.001.000	0,16	1	100	0,16	1	100	0,16
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	17.960.000	17.960.000	0,16	1	100	0,16	1	100	0,16

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D. BULAN INI		
		1 TAHUN		SATUAN	ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				75.551.000	0,69			0,69			0,69
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1	Tahun	64.794.000	64.794.000	0,59	12	100,00	0,59	12	100,00	0,59
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	5.333.000	5.333.000	0,05	1	100	0,05	1	100	0,05
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	5.424.000	5.424.000	0,05	1	100	0,05	1	100	0,05
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				40.320.000	0,37			0,37			0,37
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1	Tahun	34.560.000	34.560.000	0,32	12	100,00	0,32	12	100,00	0,32
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	2.880.000	2.880.000	0,03	1	100	0,03	1	100	0,03
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	2.880.000	2.880.000	0,03	1	100	0,03	1	100	0,03
511124	Belanja Tunjangan Fungsional				158.810.000	1,45			1,45			1,45
	- Belanja Tunjangan Fungsional	1	Tahun	137.330.000	137.330.000	1,25	12	100,00	1,25	12	100,00	1,25
	- Belanja Tunjangan Fungsional (gaji ke 13)	1	Bulan	10.040.000	10.040.000	0,09	1	100	0,09	1	100	0,09
	- Belanja Tunjangan Fungsional (gaji ke 14)	1	Bulan	11.440.000	11.440.000	0,10	1	100	0,10	1	100	0,10
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				8.078.000	0,07			0,07			0,07
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1	Tahun	2.773.000	2.773.000	0,03	12	100,00	0,03	12	100,00	0,03
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1	Bulan	2.463.000	2.463.000	0,02	1	100	0,02	1	100	0,02
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1	Bulan	2.842.000	2.842.000	0,03	1	100	0,03	1	100	0,03
511126	Belanja Tunj. Beras				151.141.000	1,38			1,38			1,38
	- Belanja Tunj. Beras	1	Tahun	151.141.000	151.141.000	1,38	12	100,00	1,38	12	100,00	1,38
511129	Belanja Uang Makan PNS				455.165.000	4,15			4,15			4,15
	- Belanja Uang Makan PNS	1	Tahun	455.165.000	455.165.000	4,15	12	100,00	4,15	12	100,00	4,15
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				95.360.000	0,87			0,87			0,87
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	Tahun	81.595.000	81.595.000	0,74	12	100,00	0,74	12	100,00	0,74
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	1	Bulan	6.780.000	6.780.000	0,06	1	100	0,06	1	100	0,06
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)	1	Bulan	6.985.000	6.985.000	0,06	1	100	0,06	1	100	0,06
512211	Belanja Uang Lembur				18.368.000	0,17			0,17			0,17
	- Belanja Uang Lembur Pegawai	1	Tahun	18.368.000	18.368.000	0,17	1	100,00	0,17	1	100,00	0,17
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)				2.718.965.000	24,82			24,82			24,82
	-Tunjangan Kinerja (14 Bulan)	1	Tahun	2.718.965.000	2.718.965.000	24,82	12	100,00	24,82	12	100,00	24,82
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTORAN				1.733.105.000	15,82			15,82			15,82

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D. BULAN INI		
		1 TAHUN		SATUAN	ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Perawatan Gedung Kantor				155.880.000	1,42			1,42			1,42
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				155.880.000	1,42			1,42			1,42
	- Gedung Kantor	236	M2	170.000	40.120.000	0,37	236	100	0,37	236	100	0,37
	- Halaman/ Taman Kantor dan Asrama	288	M2	10.000	2.880.000	0,03	288	100	0,03	288	100	0,03
	- Aula	252	M2	170.000	42.840.000	0,39	170	100	0,39	252	100	0,39
	- Asrama Pematangsiantar	412	M2	170.000	70.040.000	0,64	412	100	0,64	412	100	0,64
B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4				160.000.000	1,46			1,46			1,46
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				160.000.000	1,46			1,46			1,46
	- Kendaraan operasional roda 4	8	Unit	20.000.000	160.000.000	1,46	8	100,00	1,46	8	100,00	1,46
C	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2				24.000.000	0,22			0,22			0,22
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				24.000.000	0,22			0,22			0,22
	- Kendaraan operasional roda 2	8	Unit	3.000.000	24.000.000	0,22	8	100,00	0,22	8	100,00	0,22
D	Perawatan Sarana Gedung dan Bangunan				133.375.000	1,22			1,22			1,22
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				133.375.000	1,22			1,22			1,22
	- AC Split	48	Unit	610.000	29.280.000	0,27	48	100,00	0,27	48	100,00	0,27
	- Mesin Potong Rumput	6	Unit	1.200.000	7.200.000	0,07	6	100,00	0,07	6	100,00	0,07
	- Personal Komputer dan Laptop	46	Unit	730.000	33.580.000	0,31	46	100,00	0,31	46	100,00	0,31
	- Printer	24	Unit	690.000	16.560.000	0,15	24	100,00	0,15	24	100,00	0,15
	- Generator	3	Unit	5.000.000	15.000.000	0,14	3	100,00	0,14	3	100,00	0,14
	- Barang inventaris lainnya	1	Paket	31.755.000	31.755.000	0,29	1	100	0,29	1	100,00	0,29
E	Perawatan Jaringan				72.000.000	0,66			0,66			0,66
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				72.000.000	0,66			0,66			0,66
	- Instalasi dan jaringan (listrik,telepon,air, gas dan internet)	12	Bulan	6.000.000	72.000.000	0,66	12	100	0,66	12	100	0,66
F	Langganan Daya dan Jasa				258.600.000	2,36			2,36			2,36
522111	Belanja Langganan Listrik				140.400.000	1,28			1,28			1,28
	- Langganan Daya dan Jasa listrik	12	Bulan	11.700.000	140.400.000	1,28	12	100,00	1,28	10	100,00	1,28
522112	Belanja Langganan Telepon				1.800.000	0,02			0,02			0,02

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET		HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
		1 TAHUN			ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Langganan Daya dan Jasa Telepon	12	Bulan	150.000	1.800.000	0,02	12	100,00	0,02	10	100,00	0,02
522113	Belanja Langganan Air				60.000.000	0,55			0,55			0,55
	- Langganan Daya dan Jasa PAM	12	Bulan	5.000.000	60.000.000	0,55	12	100,00	0,55	10	100,00	0,55
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				56.400.000	0,51			0,51			0,51
	- Langganan Internet	12	Bulan	4.700.000	56.400.000	0,51	12	100,00	0,51	12	100,00	0,51
G	Tunjangan Pengelola Kegiatan Perkantoran				141.720.000	1,29			1,29			1,29
521115	Honor yang terkait dengan operasional Satuan kerja				141.720.000	1,29			1,29			1,29
	- Honorarium Pejabat KPA	12	OB	2.000.000	24.000.000	0,22	12	100,00	0,22	12	100,00	0,22
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 Orang x 12 Bln, 1 Orang x 10 Bulan), 2 Orang)	22	OB	1.500.000	33.000.000	0,30	22	100,00	0,30	22	100,00	0,30
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM	12	OB	1.250.000	15.000.000	0,14	12	100,00	0,14	12	100,00	0,14
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12	OB	1.090.000	13.080.000	0,12	12	100,00	0,12	12	100,00	0,12
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan, 5 orang	60	OB	640.000	38.400.000	0,35	60	100,00	0,35	60	100,00	0,35
	- Pejabat Pengada Barang/Jasa	12	OB	680.000	8.160.000	0,07	12	100,00	0,07	12	100,00	0,07
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	24	OB	420.000	10.080.000	0,09	24	100,00	0,09	24	100,00	0,09
I	Operasional Perkantoran				739.530.000	6,75			6,75			6,75
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				587.480.000	5,36			5,36			5,36
	- Langganan Surat kabar/koran dan majalah	12	Bulan	500.000	6.000.000	0,05	12	100,00	0,05	12	100,00	0,05
	- Inventarisasi Barang Inventaris	1	Paket	4.620.000	4.620.000	0,04	1	100,00	0,04	1	100,00	0,04
	- Biaya Instruktur Senam	12	Bulan	600.000	7.200.000	0,07	12	100,00	0,07	12	100,00	0,07
	- Honorarium Pengemudi, 2 orang, 13 Bulan	26	OB	2.100.000	54.600.000	0,50	26	100,00	0,50	26	100,00	0,50
	- Honorarium Satpam, 4 orang, 13 Bulan	52	OB	2.100.000	109.200.000	1,00	52	100,00	1,00	52	100,00	1,00
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti, 14 orang, 13 Bulan	182	OB	1.930.000	351.260.000	3,21	182	100,00	3,21	182	100,00	3,21
	- Honorarium Tenaga Administrasi, 2 Orang, 13 Bulan	26	OB	2.100.000	54.600.000	0,50	26	100,00	0,50	26	100,00	0,50
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				14.400.000	0,13			0,13			0,13
	- Pengiriman Surat-Surat dan Dokumen	12	Bulan	1.200.000	14.400.000	0,13	12	100,00	0,13	12	100,00	0,13
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi				137.650.000	1,26			1,26			1,26
	- Pengandaan foto copy, pencetakan dan penjilidan	12	Bulan	4.050.000	48.600.000	0,44	12	100,00	0,44	12	100,00	0,44
	- Keperluan sehari-hari	42	Peg	1.510.000	63.420.000	0,58	42	100,00	0,58	42	100,00	0,58
	- Operasional Widyaiswara	13	OT	1.510.000	19.630.000	0,18	13	100,00	0,18	13	100,00	0,18
	- Operasional Perpustakaan	12	Bulan	500.000	6.000.000	0,05	12	100,00	0,05	12	100,00	0,05

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BIAYA	TARGET 1 TAHUN	HARGA SATUAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET S/D BULAN INI			REALISASI S/D. BULAN INI		
				ANGGARAN	BBT (%)	VOL	%	TTB	VOL	%	TTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J	Operasional Pengelolaan Mess, dapur dan asrama			48.000.000	0,44			0,44			0,44
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Operasional pengelolaan mess, dapur dan asrama di P.Siantar & P. Buluh	12 Bln	4.000.000	48.000.000	0,44			0,44			0,44
5443	PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP			240.000.000	2,19			2,19			2,19
5443.002	JUMLAH GENERASI MUDA LINGKUNGAN HIDUP YANG MENINGKATNYA KAPASITASNYA			240.000.000	2,19			2,19			2,19
053	PELATIHAN MASYARAKAT BIDANG KEHUTANAN			240.000.000	2,19			2,19			2,19
A	PELATIHAN BUDIDAYA LEBAH MADU (SUMBAR)	1 Angk	85.290.000	85.290.000	0,78	40	100	0,78	40	100	0,78
B	PELATIHAN TEKNIK AGROFORESTRY (SUMBAR)	1 Angk	82.345.000	82.345.000	0,75	40	100	0,75	40	100	0,75
C	PELATIHAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PARTISIPATIF AREAL KERJA PERHUTANAN SOSIAL (SUMUT)	1 Angk	72.365.000	72.365.000	0,66	40	100	0,66	40	100	0,66



BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR

**Jalan Bali No. 12 Kotak Pos 116 Pematangsiantar 21142
Telp. (0622) 23908 Fax. (0622) 23771
Email : bdlhkpmatangsiantar@gmail.com**